



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dana Desa Reguler yang selanjutnya disebut ADD Reguler adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat serta mendesak setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
12. Alokasi Dana Desa Non Reguler yang selanjutnya disebut ADD Non Reguler adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di daerah.

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, *sustainable development goals* Desa dan status perkembangan Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan menghitung capaian kinerja Desa.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan menghitung capaian penanganan kemiskinan ekstrem di Desa.
17. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan pelayanan sosial.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
24. Penghasilan Tetap Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatnya yang bersumber dari Anggaran Dana Desa.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan.

27. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan direktorat jenderal pajak.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja bantuan keuangan.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan penghitungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp82.223.154.700,00 (delapan puluh dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pembagian ADD dilakukan berdasarkan formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Penyusunan formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, IDM, SDGs Desa dan kinerja desa.

Pasal 6

- (1) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan alokasi dana insentif kinerja Desa.

- (2) Formulasi alokasi dana insentif kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Afirmasi.
- (3) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembagian rincian ADD bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran ADD dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran ADD.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - d. pencapaian SDGs Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - e. status perkembangan Desa IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (3) Jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari data konsolidasi bersih semester II yang ditetapkan per 31 Desember oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari data indeks kesulitan geografis yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa.
- (5) Indeks kesulitan geografis yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan:
 - a. variabel ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang diterbitkan oleh badan pusat statistik setiap tahunnya.

- (6) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data luas wilayah yang ditetapkan berdasarkan dokumen penegasan batas Desa ataupun data luas wilayah Desa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari inputan dalam aplikasi *Dashboard* SDGs Desa.
- (8) Status perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersumber dari rekapitulasi nilai dan status IDM.

Pasal 9

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran ADD dan berdasarkan penilaian pencapaian indikator kinerja Desa.
- (2) Indikator kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolak ukur penilaian yang digunakan dalam menentukan capaian kinerja Desa.
- (3) Tolak ukur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja ADD untuk menentukan pagu Alokasi Kinerja sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Indikator kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. keterbukaan informasi publik Pemerintah Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 150 (seratus lima puluh);
 - b. Desa layak anak dengan nilai bobot indikator sebesar 200 (dua ratus);
 - c. perlindungan perempuan dan rentan lainnya dengan nilai bobot indikator sebesar 250 (dua ratus lima puluh);
 - d. Desa tangguh bencana nilai bobot indikator sebesar 125 (seratus dua puluh lima);
 - e. prestasi dan inovasi Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 220 (dua ratus dua puluh);
 - f. program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan nilai bobot indikator sebesar 135 (seratus tiga puluh lima);
 - g. percepatan dan penanganan *stunting* dengan nilai bobot indikator sebesar 150 (seratus lima puluh);
 - h. profil Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 130 (seratus tiga puluh); dan
 - i. kinerja keuangan Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 140 (seratus empat puluh).

Pasal 10

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran ADD.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Indikator Afirmasi Desa.

- (3) Indikator Afirmasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tolak ukur penilaian yang digunakan dalam menentukan capaian penanganan kemiskinan ekstrim di Desa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja ADD untuk menentukan pagu Alokasi Afirmasi sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Indikator Afirmasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) meliputi:
 - a. menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan nilai bobot indikator sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat dengan nilai bobot indikator sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima); dan
 - c. berkurangnya kantong kemiskinan melalui intervensi pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana layanan dasar dengan nilai bobot indikator sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima).
- (5) Capaian penanganan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur berdasarkan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan jumlah masyarakat miskin berdasarkan data kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 11

- (1) ADD disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyaluran ADD Reguler; dan
 - b. penyaluran ADD Non Reguler
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Mei;
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat bulan September.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dikurangi SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kedudukan anggota BPD, iuran BPJS kesehatan bagi kepala desa, Perangkat Desa dan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Non Perangkat Desa.

- (4) Rincian tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Reguler tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. permohonan kepada Bupati melalui Kepala Desa tentang Penyaluran ADD Reguler tahap I;
 - b. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh camat;
 - c. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan menggunakan anggaran ADD Reguler sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban ADD;
 - e. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2024;
 - f. peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa tahun anggaran 2025;
 - g. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2025;
 - h. laporan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa terhadap belanja ADD reguler tahap keempat tahun anggaran 2024;
 - i. foto publikasi APBDesa tahun anggaran 2024;
 - j. fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - k. fotokopi NPWP Desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Reguler tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. permohonan Kepala Desa tentang Penyaluran ADD Reguler tahap II;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD Reguler tahap I yang memuat realisasi penyerapan dan capaian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD Reguler tahap I yang telah disalurkan;
 - c. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh camat;
 - d. surat pernyataan kepala Desa atas kesanggupan menggunakan anggaran ADD Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban ADD Reguler;
 - f. laporan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa terhadap belanja ADD reguler tahap pertama Tahun Anggaran 2025;
 - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa; dan
 - h. fotokopi NPWP Desa.

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Reguler tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. permohonan Kepala Desa tentang Penyaluran ADD Reguler tahap III;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD Reguler tahap II yang memuat realisasi penyerapan dan capaian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD Reguler tahap II yang telah disalurkan;
 - c. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh camat;
 - d. surat pernyataan kepala Desa atas kesanggupan menggunakan anggaran ADD Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban ADD Reguler;
 - f. laporan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa terhadap belanja ADD reguler tahap pertama Tahun Anggaran 2025;
 - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa; dan
 - h. fotokopi NPWP Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Non Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disalurkan secara rutin setiap bulannya dan/atau secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD Non Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota badan permusyawaratan desa, dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Non Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penyaluran ADD Non Reguler SILTAP dan tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan anggota BPD dilakukan melalui RKUD ke RKD, dan selanjutnya disalurkan melalui transaksi non tunai dan/atau tunai ke penerima.
- (4) Penyaluran ADD Non Reguler Jaminan Sosial terdiri dari iuran BPJS kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dan selanjutnya disalurkan secara *auto debet* ke *virtual account* masing masing penyedia layanan jaminan sosial.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Non Reguler SILTAP dan tunjangan kepala desa, Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. surat permohonan kepada Bupati adalah penyaluran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan anggota BPD;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan kepala desa, dan Perangkat Desa;

- c. fotokopi surat keputusan pengangkatan anggota BPD; dan
 - d. fotokopi Buku Rekening Kas Desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Non Reguler berupa Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), meliputi:
- a. surat permohonan penyaluran Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Non Perangkat Desa bulan ke-1 (satu) sampai dengan bulan ke-12 (dua belas);
 - b. surat pernyataan kesediaan Kepala Desa untuk dilakukan pemotongan langsung dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan tiap bulannya;
 - c. data kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. fotokopi buku Rekening Kas Desa; dan
 - e. fotokopi NPWP Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SURIANI, A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 40

FORMULASI ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	645.954.456,00	210.622.501,00	118.763.242,00	17.225.452,00
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	645.954.456,00	270.575.141,00	309.144.702,00	64.595.445,00
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	645.954.456,00	309.563.202,00	172.925.064,00	60.289.082,00
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	645.954.456,00	227.696.893,00	274.312.338,00	40.910.448,00
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	645.954.456,00	293.663.930,00	217.948.158,00	27.991.359,00
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	645.954.456,00	249.867.476,00	286.034.883,00	55.982.719,00
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	645.954.456,00	212.845.249,00	149.861.434,00	30.144.541,00
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	645.954.456,00	225.201.881,00	31.005.813,00	12.919.089,00
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	645.954.456,00	289.955.895,00	324.121.608,00	53.829.538,00
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	645.954.456,00	242.322.760,00	232.543.604,00	129.190.891,00
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	645.954.456,00	254.620.059,00	211.965.439,00	40.910.448,00
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	645.954.456,00	222.218.065,00	31.005.813,00	17.225.452,00
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	645.954.456,00	224.615.042,00	392.109.980,00	68.901.808,00
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	645.954.456,00	263.860.112,00	231.728.520,00	79.667.716,00
15	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	645.954.456,00	266.895.897,00	280.121.608,00	83.974.079,00
16	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	645.954.456,00	272.608.044,00	454.838.339,00	25.838.178,00
17	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	645.954.456,00	378.893.394,00	213.451.065,00	68.901.808,00
18	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	645.954.456,00	261.054.896,00	178.855.620,00	23.684.996,00
19	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	645.954.456,00	218.490.343,00	215.555.070,00	25.838.178,00
20	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE	645.954.456,00	202.500.644,00	136.005.813,00	15.072.270,00
21	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE	645.954.456,00	207.471.109,00	229.144.702,00	79.667.716,00
22	BALOCCHI	TOMPOBULU	645.954.456,00	445.462.711,00	353.740.148,00	114.118.620,00
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	645.954.456,00	247.682.410,00	228.283.430,00	43.063.630,00
24	BUNGORO	TABO TABO	645.954.456,00	378.505.352,00	103.352.713,00	38.757.267,00
25	BUNGORO	MANGILU	645.954.456,00	314.065.847,00	246.179.424,00	47.369.993,00
26	BUNGORO	BULU CINDEA	645.954.456,00	277.632.625,00	554.121.608,00	64.595.445,00
27	BUNGORO	BIRING ERE	645.954.456,00	244.818.170,00	436.942.344,00	34.450.904,00
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	645.954.456,00	221.148.119,00	282.780.523,00	55.982.719,00
29	LABAKKANG	MANAKKU	645.954.456,00	246.390.997,00	273.069.605,00	36.604.085,00
30	LABAKKANG	GENTUNG	645.954.456,00	226.520.774,00	267.040.697,00	73.208.171,00
31	LABAKKANG	BATARA	645.954.456,00	276.571.570,00	464.266.149,00	99.046.350,00
32	LABAKKANG	TARAWEANG	645.954.456,00	312.806.695,00	502.352.874,00	99.046.350,00
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	645.954.456,00	283.412.357,00	470.462.693,00	51.676.356,00
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	645.954.456,00	240.578.489,00	414.456.879,00	60.289.082,00
35	LABAKKANG	KASSI LOE	645.954.456,00	250.127.005,00	409.624.515,00	83.974.079,00
36	LABAKKANG	BARA BATU	645.954.456,00	287.056.098,00	584.792.151,00	62.442.264,00
37	MARANG	PADANG LAMPE	645.954.456,00	289.641.457,00	452.878.875,00	71.054.990,00
38	MARANG	TAMANGAPA	645.954.456,00	241.384.613,00	331.179.424,00	90.433.623,00
39	MARANG	PITUSUNGGU	645.954.456,00	203.012.919,00	312.468.346,00	27.991.359,00
40	MARANG	PITUE	645.954.456,00	236.270.638,00	334.566.698,00	71.054.990,00
41	MARANG	PUNRANGA	645.954.456,00	209.189.478,00	222.543.604,00	64.595.445,00
42	MARANG	ALESIPITTO	645.954.456,00	209.326.065,00	269.503.068,00	23.684.996,00
43	SEGERI	BARING	645.954.456,00	386.942.254,00	273.115.794,00	30.144.541,00
44	SEGERI	PARENRENG	645.954.456,00	263.364.316,00	421.583.979,00	73.208.171,00
45	MINASA TENE	KABBA	645.954.456,00	296.325.719,00	379.335.432,00	71.054.990,00
46	MINASA TENE	PANAIKANG	645.954.456,00	244.646.253,00	357.277.616,00	49.523.175,00
47	MANDALLE	BENTENG	645.954.456,00	253.680.009,00	366.248.707,00	21.531.815,00
48	MANDALLE	MANGGALUNG	645.954.456,00	221.794.554,00	334.133.074,00	53.829.538,00
49	MANDALLE	TAMARUPA	645.954.456,00	217.831.444,00	398.283.430,00	55.982.719,00
50	MANDALLE	MANDALLE	645.954.456,00	233.727.019,00	246.416.343,00	99.046.350,00

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi
51	MANDALLE	BODDIE	645.954.456,00	228.123.686,00	204.121.608,00	92.586.805,00
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	645.954.456,00	212.551.812,00	290.341.246,00	71.054.990,00
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	645.954.456,00	288.289.195,00	207.399.063,00	55.982.719,00
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	645.954.456,00	259.841.062,00	269.970.192,00	25.838.178,00
55	TONDONG TALLASA	LANNE	645.954.456,00	269.321.128,00	384.456.879,00	116.271.802,00
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	645.954.456,00	253.583.768,00	152.063.791,00	88.280.442,00
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	645.954.456,00	235.899.437,00	203.069.605,00	60.289.082,00
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	645.954.456,00	224.971.290,00	262.063.791,00	124.884.528,00
59	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO KANJA	645.954.516,00	245.700.883,00	678.381.782,00	129.190.921,00
60	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BAJI	645.954.456,00	182.300.555,00	302.399.063,00	30.144.541,00
61	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BULU	645.954.456,00	275.154.184,00	185.821.059,00	79.667.716,00
62	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BOMBANG	645.954.456,00	232.400.348,00	513.427.971,00	36.604.085,00
63	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO LABANGENG	645.954.456,00	243.058.598,00	340.127.422,00	21.531.815,00
64	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO ULENG	645.954.456,00	363.564.873,00	370.988.694,00	21.531.815,00
65	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO WALIE	645.954.456,00	214.596.571,00	278.786.337,00	71.054.990,00
Total			41.987.039.700,00	16.794.815.880,00	19.625.861.461,00	3.815.437.659,00

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



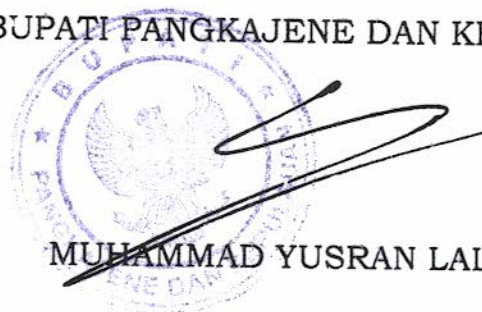
MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD Desa
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	992.565.651
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	1.290.269.744
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	1.188.731.804
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	1.188.874.135
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	1.185.557.903
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	1.237.839.534
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	1.038.805.680
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	915.081.239
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	1.313.861.497
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	1.250.011.711
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	1.153.450.402
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	916.403.786
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	1.331.581.286
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	1.221.210.804
15	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	1.276.946.040
16	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	1.399.239.017
17	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	1.307.200.723
18	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	1.109.549.968
19	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	1.105.838.047
20	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE	999.533.183
21	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE	1.162.237.983
22	BALOCCHI	TOMPOBULU	1.559.275.935
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	1.164.983.926
24	BUNGORO	TABO TABO	1.166.569.788
25	BUNGORO	MANGILU	1.253.569.720
26	BUNGORO	BULU CINDEA	1.542.304.134
27	BUNGORO	BIRING ERE	1.362.165.874
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	1.205.865.817
29	LABAKKANG	MANAKKU	1.202.019.143
30	LABAKKANG	GENTUNG	1.212.724.098
31	LABAKKANG	BATARA	1.485.838.525
32	LABAKKANG	TARAWANG	1.560.160.375
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	1.451.505.862
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	1.361.278.906
35	LABAKKANG	KASSI LOE	1.389.680.055

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD Desa
36	LABAKKANG	BARA BATU	1.580.244.969
37	MARANG	PADANG LAMPE	1.459.529.778
38	MARANG	TAMANGAPA	1.308.952.116
39	MARANG	PITUSUNGGU	1.189.427.080
40	MARANG	PITUE	1.287.846.782
41	MARANG	PUNRANGA	1.142.282.983
42	MARANG	ALESIPITTO	1.148.468.585
43	SEGERI	BARING	1.336.157.045
44	SEGERI	PARENRENG	1.404.110.922
45	MINASA TENE	KABBA	1.392.670.597
46	MINASA TENE	PANAİKANG	1.297.401.500
47	MANDALLE	BENTENG	1.287.414.987
48	MANDALLE	MANGGALUNG	1.255.711.622
49	MANDALLE	TAMARUPA	1.318.052.049
50	MANDALLE	MANDALLE	1.225.144.168
51	MANDALLE	BODDIE	1.170.786.555
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	1.219.902.504
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	1.197.625.433
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	1.201.603.888
55	TONDONG TALLASA	LANNE	1.416.004.265
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	1.139.882.457
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	1.145.212.580
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	1.257.874.065
59	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO KANJA	1.699.228.102
60	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BAJI	1.160.798.615
61	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BULU	1.186.597.415
62	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BOMBANG	1.428.386.860
63	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO LABANGENG	1.250.672.291
64	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO ULENG	1.402.039.838
65	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO WALIE	1.210.392.354
Total			82.223.154.700

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Desa	PAGU ADD 2025	ADD NON REGULER	ADD REGULER		
					Tahap I 30%	Tahap II 40%	Tahap III 30%
1	Liukang Tangaya	Sabaru	992.565.651,00	498.747.600,00	148.145.415,00	197.527.221,00	148.145.415,00
2	Liukang Tangaya	Balo Baloang	1.290.269.744,00	633.061.040,00	197.162.611,00	262.883.482,00	197.162.611,00
3	Liukang Tangaya	Sabalana	1.188.731.804,00	664.213.680,00	157.355.437,00	209.807.250,00	157.355.437,00
4	Liukang Tangaya	Tampaang	1.188.874.135,00	526.155.120,00	198.815.704,00	265.087.607,00	198.815.704,00
5	Liukang Tangaya	Sailus	1.185.557.903,00	663.004.080,00	156.766.146,00	209.021.531,00	156.766.146,00
6	Liukang Tangaya	Satanger	1.237.839.534,00	506.685.600,00	219.346.180,00	292.461.574,00	219.346.180,00
7	Liukang Tangaya	Kapoposan Bali	1.038.805.680,00	454.438.880,00	175.310.040,00	233.746.720,00	175.310.040,00
8	Liukang Tangaya	Poleonro	915.081.239,00	467.852.400,00	134.168.651,00	178.891.537,00	134.168.651,00
9	Liukang Kalmas	Pammas	1.313.861.497,00	554.767.920,00	227.728.073,00	303.637.431,00	227.728.073,00
10	Liukang Kalmas	Sabaru	1.250.011.711,00	490.743.600,00	227.780.433,00	303.707.245,00	227.780.433,00
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	1.153.450.402,00	534.009.600,00	185.832.240,00	247.776.322,00	185.832.240,00
12	Liukang Kalmas	Doang Doangan Lompo	916.403.786,00	506.228.400,00	123.052.615,00	164.070.156,00	123.052.615,00
13	Liukang Kalmas	Marasende	1.331.581.286,00	505.074.400,00	247.952.065,00	330.602.756,00	247.952.065,00
14	Liukang Kalmas	Dewakang	1.221.210.804,00	540.430.320,00	204.234.145,00	272.312.194,00	204.234.145,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattiro Deceng	1.276.946.040,00	602.446.640,00	202.349.820,00	269.799.760,00	202.349.820,00
16	Liukang Tupabbiring	Mattiro Langi	1.399.239.017,00	597.412.000,00	240.548.105,00	320.730.807,00	240.548.105,00
17	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	1.307.200.723,00	526.621.200,00	234.173.856,00	312.231.811,00	234.173.856,00
18	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	1.109.549.968,00	524.792.400,00	175.427.270,00	233.903.028,00	175.427.270,00
19	Liukang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	1.105.838.047,00	596.619.440,00	152.765.582,00	203.687.443,00	152.765.582,00
20	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bone	999.533.183,00	505.678.800,00	148.156.314,00	197.541.755,00	148.156.314,00
	Liukang Tupabbiring	Mattaro Adae	1.162.237.983,00	531.373.200,00	189.259.434,00	252.345.915,00	189.259.434,00

No	Kecamatan	Desa	PAGU ADD 2025	ADD NON REGULER	ADD REGULER		
					Tahap I 30%	Tahap II 40%	Tahap III 30%
22	Balocci	Tompobulu	1.559.275.935,00	564.961.120,00	298.294.444,00	397.725.927,00	298.294.444,00
23	Bungoro	Bowong Cindea	1.164.983.926,00	590.491.120,00	172.347.841,00	229.797.124,00	172.347.841,00
24	Bungoro	Tabo Tabo	1.166.569.788,00	597.648.960,00	170.676.248,00	227.568.332,00	170.676.248,00
25	Bungoro	Mangilu	1.253.569.720,00	567.310.320,00	205.877.820,00	274.503.760,00	205.877.820,00
26	Bungoro	Bulu Cindea	1.542.304.134,00	637.453.040,00	271.455.328,00	361.940.438,00	271.455.328,00
27	Bungoro	Biring Ere	1.362.165.874,00	620.078.000,00	222.626.362,00	296.835.150,00	222.626.362,00
28	Labakkang	Pattalassang	1.205.865.817,00	599.660.320,00	181.861.649,00	242.482.199,00	181.861.649,00
29	Labakkang	Manakku	1.202.019.143,00	600.956.320,00	180.318.846,00	240.425.131,00	180.318.846,00
30	Labakkang	Gentung	1.212.724.098,00	589.929.520,00	186.838.373,00	249.117.832,00	186.838.373,00
31	Labakkang	Batara	1.485.838.525,00	592.287.520,00	268.065.301,00	357.420.403,00	268.065.301,00
32	Labakkang	Taraweang	1.560.160.375,00	648.432.960,00	273.518.224,00	364.690.967,00	273.518.224,00
33	Labakkang	Kanaungan	1.451.505.862,00	591.135.520,00	258.111.102,00	344.148.138,00	258.111.102,00
34	Labakkang	Bonto Manai	1.361.278.906,00	595.988.320,00	229.587.175,00	306.116.236,00	229.587.175,00
35	Labakkang	Kassi Loe	1.389.680.055,00	605.761.520,00	235.175.560,00	313.567.415,00	235.175.560,00
36	Labakkang	Bara Batu	1.580.244.969,00	677.319.360,00	270.877.682,00	361.170.245,00	270.877.682,00
37	Marang	Padang Lampe	1.459.529.778,00	596.367.360,00	258.948.725,00	345.264.968,00	258.948.725,00
38	Marang	Tamangapa	1.308.952.116,00	625.717.040,00	204.970.522,00	273.294.032,00	204.970.522,00
39	Marang	Pitusunggu	1.189.427.080,00	567.207.520,00	186.665.868,00	248.887.824,00	186.665.868,00
40	Marang	Pitue	1.287.846.782,00	638.101.040,00	194.923.722,00	259.898.298,00	194.923.722,00
41	Marang	Punranga	1.142.282.983,00	570.883.120,00	171.419.958,00	228.559.947,00	171.419.958,00
42	Marang	Alesipitto	1.148.468.585,00	531.343.920,00	185.137.399,00	246.849.867,00	185.137.399,00
43	Segeri	Baring	1.336.157.045,00	544.868.400,00	237.386.593,00	316.515.459,00	237.386.593,00
44	Segeri	Paranreng	1.404.110.922,00	594.430.320,00	242.904.180,00	323.872.242,00	242.904.180,00
45	Minasa Tene	Kabba	1.392.670.597,00	562.386.000,00	249.085.379,00	332.113.839,00	249.085.379,00
46	Minasa Tene	Panaikang	1.297.401.500,00	556.436.880,00	222.289.386,00	296.385.848,00	222.289.386,00
47	Mandalle	Benteng	1.287.414.987,00	599.530.720,00	206.365.280,00	275.153.707,00	206.365.280,00
48	Mandalle	Manggalung	1.255.711.622,00	596.342.320,00	197.810.790,00	263.747.722,00	197.810.790,00

No	Kecamatan	Desa	PAGU ADD 2025	ADD NON REGULER	ADD REGULER		
					Tahap I 30%	Tahap II 40%	Tahap III 30%
49	Mandalle	Tama Rupa	1.318.052.049,00	593.353.120,00	217.409.678,00	289.879.573,00	217.409.678,00
50	Mandalle	Mandalle	1.225.144.168,00	555.815.600,00	200.797.370,00	267.729.828,00	200.797.370,00
51	Mandalle	Boddie	1.170.786.555,00	596.276.320,00	172.353.070,00	229.804.095,00	172.353.070,00
52	Mandalle	Coppo Tompong	1.219.902.504,00	535.792.080,00	205.233.127,00	273.644.170,00	205.233.127,00
53	Tondong Tallasa	Banti Murung	1.197.625.433,00	601.830.500,00	178.738.479,00	238.317.975,00	178.738.479,00
54	Tondong Tallasa	Tondong Kura	1.201.603.888,00	626.648.240,00	172.486.694,00	229.982.260,00	172.486.694,00
55	Tondong Tallasa	Lanne	1.416.004.265,00	614.806.640,00	240.359.287,00	320.479.051,00	240.359.287,00
56	Tondong Tallasa	Bulu Tellue	1.139.882.457,00	526.812.720,00	183.920.921,00	245.227.895,00	183.920.921,00
57	Tondong Tallasa	Malaka	1.145.212.580,00	506.894.160,00	191.495.526,00	255.327.368,00	191.495.526,00
58	Tondong Tallasa	Bonto Birao	1.257.874.065,00	452.789.600,00	241.525.339,00	322.033.787,00	241.525.339,00
59	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Kanja	1.699.228.102,00	532.064.400,00	350.149.110,00	466.865.482,00	350.149.110,00
60	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Beji	1.160.798.615,00	566.382.880,00	178.324.720,00	237.766.295,00	178.324.720,00
61	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bulu	1.186.597.415,00	555.178.800,00	189.425.584,00	252.567.447,00	189.425.584,00
62	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bombang	1.428.386.860,00	669.586.560,00	227.640.090,00	303.520.120,00	227.640.090,00
63	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Labangeng	1.250.672.291,00	495.622.800,00	226.514.847,00	302.019.797,00	226.514.847,00
64	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Uleang	1.402.039.838,00	587.571.520,00	244.340.495,00	325.787.398,00	244.340.495,00
65	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Wale	1.210.392.354,00	637.323.440,00	171.920.674,00	229.227.566,00	171.920.674,00
TOTAL			82.223.154.700,00				

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU